

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSEBILITAS KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS

Daswita Suliadi^{*1}, Masdar Mas'ud², Sylvia³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}daswita.suliadi@yahoo.com, ²masdarmas'ud@umi.ac.id, ³sylvia.sjarlis2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang berarti sampel penelitian adalah seluruh jumlah populasi dalam penelitian yakni 30. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial maupun simultan Sistem Akuntansi Pemerintahan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi R² atau R Square sebesar 0,708. Hasil ini berarti bahwa variabel Sistem Akuntansi Pemerintahan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan memiliki hubungan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 70,8%, dan sisanya 29,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintahan, Penyajian, Aksesibilitas, Transparansi, Keuangan

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the effect of the accounting system, presentation of financial reports, and financial accessibility on the transparency of regional financial management. The type of research used in this research is quantitative with a survey approach. The sampling technique used in this study uses a saturated sample technique, which means that the research sample is the entire population in the study, namely 30. The data type used in this study is quantitative, while the data source uses primary data. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study prove that partially or simultaneously, the Accounting System, Financial Report Presentation, and Financial Accessibility have a positive and significant effect on the Transparency of Regional Financial Management in the Regional Government of Maros Regency. This study produces a coefficient of determination of R² or R Square of 0.708. This result means that the variables of Accounting System, Presentation of Financial Statements, and Financial Accessibility have a relationship with Transparency in Regional Financial Management of 70.8%, and other causes outside the model explain the remaining 29.2%.

Keywords: Accounting System, Presentation, Accessibility, Transparency, Finance.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kita semua menginginkan terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam *good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan

yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diharapkan sumber daya daerah yang dikelola oleh pemerintah benar-benar mencapai tujuan bersama, yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Pemerintahan yang baik tercermin dari adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, dan akuntabilitas.

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2013). Setiap daerah harus mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dari daerah yang bersangkutan seperti laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang mengarahkan untuk mengimplementasikan *good governance* maka pemerintah daerah tidak dapat lagi menutup-nutupi kondisi keuangannya dari publik.

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sekarang perhatian semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparan. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997 (Mahmudi, 2013).

Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keuangan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku *stakeholders* mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja (Mahmudi, 2013). Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem

akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan adanya manfaat atas pelaksanaan sistem tersebut, diharapkan dapat mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah dan pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah.

Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya transparansi diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Meskipun bukan suatu kewajiban, paling tidak sebagai acuan atau pedoman agar tidak terlalu jauh menyimpang dari kemauan dan kebutuhan pemerintah secara keseluruhan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab, jujur, dan adil.

Permasalahan lain yang timbul adalah aksesibilitas dari laporan keuangan yang tidak berjalan maksimal. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo dalam Hehanussa, 2015).

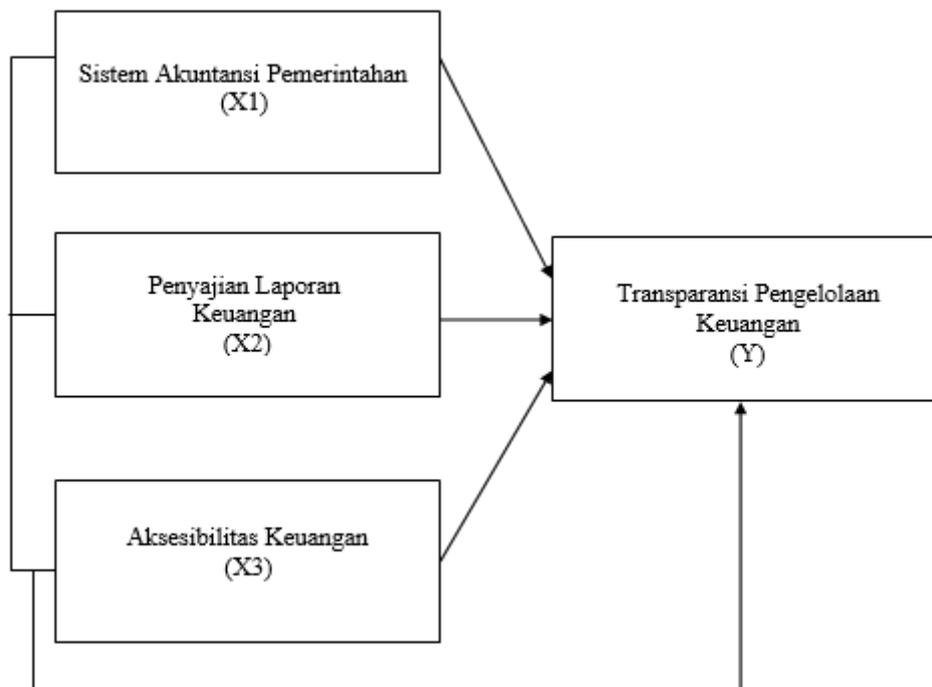
Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki visi “Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui Pemerintahan yang bersih dan profesional”. Sejalan dengan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Maros diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya melalui pelaporan keuangan yang transparan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Maros adalah bentuk pertanggungjawabannya terhadap pengguna laporan keuangan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi laporan keuangan tersebut. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut harus sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yakni berupa laporan realisasi anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang harus disajikan secara lengkap. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi pemerintah Kabupaten Maros karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif kearah tersebut.

Meskipun keberadaan *website* pemerintah Kabupaten Maros yakni Maroskab.go.id merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi pemerintahan di Kabupaten Maros. Namun pada kenyataannya, masih sedikit data-data dan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah bahkan SKPD yang dapat diakses oleh masyarakat. Laporan keuangan seakan ditutup-tutupi dan dirahasiakan dari masyarakat

dan hanya dijadikan konsumsi untuk kalangan tertentu. Pemerintah Kabupaten Maros harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Selain itu, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memunculkan hasil yang belum konsisten misalnya penelitian dari Handri dan Rahmawati (2014) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan, sedangkan penelitian Purba (2018) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Kemudian, hasil penelitian selanjutnya dari Aliyah dan Nahar (2012) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan, sedangkan dalam penelitian Yuliani (2017) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak memberikan pengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian mengenai aksesibilitas dalam Hehanussa (2015) mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, sedangkan hasil penelitian Nurfadilah dan Santoso (2022) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat beberapa hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
2. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
3. Aksesibilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
4. Sistem Akuntansi Pemerintahan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan berpengaruh secara bersama-sama positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang (yang disebut dengan responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Metode survei digunakan dalam mengetahui sikap, pengetahuan, serta tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian yang dikemukakan dalam instrumen penelitian. Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk suatu penelitian (Sugiyono, 2018). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, yang beralamat di JL. Jend. A. Yani, No. 6, Turikale, Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai bagian keuangan dan pegawai yang memiliki interaksi langsung dengan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang berjumlah 30 orang. Dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang relatif kecil maka, teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang berarti sampel penelitian adalah seluruh jumlah populasi dalam penelitian yakni 30 responden

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2017). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket (questionnaire). Angket (questionnaire) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas merupakan jenis pengujian statistik dengan meneliti valid tidaknya sebuah data penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel. Dengan taraf signifikansi 5% diperoleh r-tabel 0,367.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sistem Akuntansi (X1)	Pernyataan 1	0,891	0,367	Valid
	Pernyataan 2	0,914	0,367	Valid
	Pernyataan 3	0,646	0,367	Valid
Penyajian Laporan Keuangan (X2)	Pernyataan 1	0,862	0,367	Valid
	Pernyataan 2	0,776	0,367	Valid
	Pernyataan 3	0,790	0,367	Valid
	Pernyataan 4	0,842	0,367	Valid
Aksesibilitas Keuangan (X3)	Pernyataan 1	0,955	0,367	Valid
	Pernyataan 2	0,900	0,367	Valid
	Pernyataan 3	0,933	0,367	Valid
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Pernyataan 1	0,742	0,367	Valid
	Pernyataan 2	0,773	0,367	Valid
	Pernyataan 3	0,907	0,367	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1. diketahui bahwa masing-masing item pernyataan memiliki r-hitung > r-tabel (0,367) dan bernilai positif. Dengan demikian setiap pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid dan layak dilanjutkan untuk melakukan penelitian.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama. Dalam uji reliabilitas kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cornbach alpa* lebih besar dari 0,50.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Sistem Akuntansi (X1)	0,761	0,50	Reliabel
Penyajian Laporan Keuangan (X2)	0,875	0,50	Reliabel
Aksesibilitas Keuangan (X3)	0,915	0,50	Reliabel
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,739	0,50	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 2. menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki *cronbach alpha* > 0,50. Dengan begitu, semua variabel X dan Y dapat dinyatakan reliabel

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Joseph Hair (Sugiyono, 2018) analisis regresi linear berganda pada

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer IBM *SPSS for Windows* versi 25. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Adapun hasil analisis dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.803	1.820		.441	.663
	X1 (Sistem Akuntansi)	.293	.131	.270	2.237	.034
	X2 (Penyajian Laporan Keuangan)	.146	.068	.256	2.136	.042
	X3 (Aksesibilitas Keuangan)	.416	.104	.524	3.996	.000

a. Dependent Variable: Y (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)
 Sumber: Output SPSS 25

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,803 + 0,293 X1 + 0,146 X2 + 0,416 X3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda diatas dapat interprestasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,803 (Positif) artinya, jika variabel bebas, yaitu Sistem Akuntansi, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan nilainya tetap atau konstan, maka variabel terikat, yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,803.
2. Nilai koefisien variabel Sistem Akuntansi (X1) sebesar 0,293 artinya jika Sistem Akuntansi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkat sebesar 0,293. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Sistem Akuntansi dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Nilai koefisien variabel Penyajian Laporan Keuangan (X2) adalah sebesar 0,146 artinya jika variabel Penyajian Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan meningkat sebesar 0,146. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Penyajian Laporan Keuangan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Nilai koefisien variabel Aksesibilitas Keuangan (X3) adalah sebesar 0,416 artinya jika Aksesibilitas Keuangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan ikut meningkat sebesar

0,416. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Aksesibilitas Keuangan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uji T (Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel t-statistik dengan taraf signifikan 0,05, dan uji 2 sisi. Diperoleh hasil t-tabel = 1,052. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara Sistem Akuntansi (X1) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Penelitian ini menghasilkan nilai t-hitung X1 sebesar 2,237 sedangkan nilai t-tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 2,052. Hasil ini menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($2,237 > 2,052$), hal ini membuktikan terdapat pengaruh antara variabel Sistem Akuntansi (X1) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Nilai signifikansi penelitian 0,034 lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat alfa 0,05 dengan demikian hal ini membuktikan pengaruh Sistem Akuntansi (X1) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) secara parsial signifikan.

2. Pengaruh antara Penyajian Laporan Keuangan (X2) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Penelitian ini menghasilkan nilai t-hitung X2 sebesar 2,136 sedangkan nilai t-tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 2,052. Hasil ini menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($2,136 > 2,052$), hal ini membuktikan terdapat pengaruh antara variabel Penyajian Laporan Keuangan (X2) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Nilai signifikansi penelitian 0,042 lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat alfa 0,05 dengan demikian hal ini membuktikan pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X2) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) secara parsial signifikan.

3. Pengaruh antara Aksesibilitas Keuangan (X3) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Penelitian ini menghasilkan nilai t-hitung X3 sebesar 3,996 sedangkan nilai t-tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 2,052. Hasil ini menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($3,996 > 2,052$), hal ini membuktikan terdapat pengaruh antara variabel Aksesibilitas Keuangan (X3) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Nilai signifikansi penelitian 0,000 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat alfa 0,05 dengan demikian hal ini membuktikan pengaruh Aksesibilitas Keuangan (X3) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) secara parsial signifikan.

Uji F (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Besarnya nilai F-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$, pada tabel f statistik diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,704. Hasil uji F (simultan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	29.362	3	9.787	21.021	.000 ^b
Residual	12.105	26	.466		
Total	41.467	29			

- a. Dependent Variable: Y (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)
 b. Predictors: (Constant), X3 (Aksesibilitas Keuangan), X2 (Penyajian Laporan Keuangan), X1 (Sistem Akuntansi)
 Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 6. diketahui nilai F-hitung sebesar 21,021 dan nilai signifikansinya 0,000. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($21,021 > 2,98$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,00 < 0,05$). Sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Sistem Akuntansi, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen menjadi sangat terbatas.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.841	.708	.674	.68233	1.677

- a. Predictors: (Constant), X3 (Aksesibilitas Keuangan), X2 (Penyajian Laporan Keuangan), X1 (Sistem Akuntansi)
 b. Dependent Variable: Y (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)
 Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 7. dapat diketahui bahwa perolehan nilai koefisien determinasi R^2 atau *R Square* adalah sebesar 0,708. Hasil ini berarti bahwa variabel Sistem Akuntansi (X1), Penyajian Laporan Keuangan (X2) dan Aksesibilitas Keuangan (X3) memiliki hubungan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 70,8%, dan sisanya 29,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Akuntansi terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Sistem Akuntansi mengalami peningkatan, maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Sistem

Akuntansi dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Adapun hasil uji t yang dilakukan pada variabel Sistem Akuntansi dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Sistem Akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Kemudian, dari hasil uji koefisien beta atau uji dominasi menunjukkan bahwa variabel independen Sistem Akuntansi merupakan variabel yang memiliki kekuatan yang paling kecil diantara variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependennya yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hal ini mengandung makna bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Maros telah memudahkan kinerja pmda dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaporan keuangan. Bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu penerapan prosedur yang berfungsi dengan baik dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros yakni, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada sumber dan alokasi dana pemerintahan selama periode tersebut, serta seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah berkenaan uang dan barang telah dianggarkan dalam APBD. Sistem tersebut, merupakan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, semakin baik pemerintah khususnya Kabupaten Maros mengelola sistem akuntansi keuangan ini maka tingkat transparansinya juga akan semakin meningkat.

Hasil dalam penelitian ini didukung oleh pendapat Antika, dkk. (2020) yang mengemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi. Lebih lanjut menurut Suprihastini, dkk. (2017) bahwa tuntutan dilaksanakannya transparansi keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah baik kepada pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat pada umumnya. Hal ini membutuhkan sebuah sistem yang baik untuk proses pencatatan, administrasi, pengelolaan dan pelaporan terkait data keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat peranan yang sangat penting untuk menyampaikan informasi maupun penyikapan kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah demi menyediakan pencapaian keterbukaan maupun pertanggungjawaban publik. Tuntutan pelaksanaan keterbukaan publik tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk senantiasa mengevaluasi sistem pencatatan akuntansinya.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Penyajian Laporan Keuangan mengalami peningkatan, maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Penyajian Laporan Keuangan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Adapun hasil uji t yang dilakukan pada variabel Penyajian Laporan Keuangan dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen Penyajian Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah lengkap dan sudah memadai serta kebijakan penyusunan laporan keuangan daerah yang diterapkan dalam Kabupaten Maros sudah sesuai dengan SAP yang berlaku atau tanpa menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini didukung dengan catatan atas laporan keuangan Kabupaten Maros yang menerapkan konsep basis akrual seperti yang telah ditetapkan oleh UU No.17 Tahun 2003 dan PP No.71 Tahun 2010. Sehingga, penyajian laporan keuangan mampu memberikan informasi secara maksimal kepada pengguna. Hal ini menyebabkan adanya transparansi dalam penyajian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Yuliani (2017) bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Menurut Hehanussa (2015) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya juga akan menciptakan akuntabilitas. Semakin lengkap penyajian laporan keuangan daerah serta semakin sesuai dengan SAP yang berlaku maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan menjadi alat ukur kinerja daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Aksesibilitas Keuangan mengalami peningkatan, maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Aksesibilitas Keuangan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Adapun hasil uji t yang dilakukan pada variabel Aksesibilitas Keuangan dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen Aksesibilitas Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Kemudian, dari hasil uji koefisien beta atau uji dominasi menunjukkan bahwa variabel independen Aksesibilitas Keuangan merupakan variabel yang memiliki kekuatan yang paling ekstrim diantara variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependennya yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Aksesibilitas Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hal ini mengandung makna bahwa

pemerintah daerah Kabupaten Maros telah melakukan upaya dalam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapat informasi terkait laporan keuangan daerah melalui sebuah wadah informasi bagi masyarakat dalam bentuk *website*, dimana situs resmi pemerintah ini akan menjadi gerbang (*gateway*) sekaligus sebagai induk informasi segala aktifitas kelembagaan yang telah diintegrasikan keseluruhan SKPD, Kecamatan, Kelurahan di lingkungan Pemkab Maros. Dengan adanya situs resmi pemerintah tersebut, maka akses publik terhadap laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip keterbukaan sehingga perlu dimaksimalkan agar masyarakat bisa mendapat dan memahami laporan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Molle, dkk. (2017) bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah bermaksud guna mempermudah pengguna dalam mengakses laporan keuangan. Sudah sepatutnya pemerintah daerah mempermudah akses, termasuk bagi masyarakat yang sudah memberi wewenang ke pemerintah daerah guna mengatur dana publik. Melalui upaya mempermudah akses bagi pengguna laporan keuangan, masyarakat pun bisa mengatur tanggung jawab dalam mempergunakan aset daerah maupun kebijakan daerah. Melalui pengontrolan yang baik, paling tidak pemerintah mampu memaksimalkan keterbukaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang pemerintah daerah hasilkan telah terpublikasikan secara transparan atau sesuai prinsip keterbukaan melalui media massa. Aksesibilitas memiliki keterkaitan terhadap keterbukaan pengelolaan keuangan daerah, dimana aksesibilitas yang efektif tergantung kepada kemudahan akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami.

Pengaruh Sistem Akuntansi, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan secara simultan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Sistem Akuntansi, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, apabila penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah di Kabupaten Maros berjalan dengan baik, serta laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai tanpa menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku dan adanya keterbukaan informasi terkait laporan keuangan daerah melalui *website*, resmi pemerintah, maka kesemua hal tersebut akan dapat memudahkan kinerja pemda dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dapat meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian, dari hasil uji dominan yang telah dilakukan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan memiliki nilai yang kontribusinya paling kecil diantara variabel independen lainnya. Sedangkan, untuk variabel Sistem Akuntansi nilai kontribusi yang dimilikinya lebih besar dari variabel Penyajian Laporan Keuangan, namun lebih kecil dari variabel Aksesibilitas Keuangan. Dan untuk variabel Aksesibilitas Keuangan menunjukkan bahwa nilai kontribusi yang dimilikinya paling besar diantara variabel independen lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Aksesibilitas Keuangan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Transparansi Pengelolaan

Kuangan Daerah. Adapun perolehan nilai hasil uji koefisien determinasi R^2 menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan memiliki hubungan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 70,8%, dan sisanya 29,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Sehingga semakin baik Sistem Akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkat.
2. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Sehingga semakin baik Penyajian Laporan Keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkat.
3. Aksesibilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Sehingga semakin baik Aksesibilitas Keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkat.
4. Sistem Akuntansi, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hal tersebut membuktikan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Maros memiliki Sistem Akuntansi yang efektif, Penyajian Laporan Keuangan yang baik, serta menerapkan Aksesibilitas Keuangan yang mudah, maka secara simultan hal ini akan meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 137-150. <https://doi.org/10.14710/jaa.8.2.137-150>.
- Handri, Y. P., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Penelitian pada SKPD di Pemerintahan kota Padang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 4(1).
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

- keuangan daerah Kota Ambon. In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM) (Vol. 2, No. 1, pp. 82-90).
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu. Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
- Muhammad, H., Sylvia, S., Fitriani, L., & Nurhaedah, N. (2022). *Kajian Evaluasi Sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2022*. *Naskah Akademis*.
- Nurfadilah, Y., & Santoso, S. (2022). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar*. *Surakarta Accounting Review*, 4(2), 99-111.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purba, R. B. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Yuliani, N. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1).
- Utari, N., Firman, A., & Rahman, M. R. G. (2023). *PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI*. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)*, 2(4), 461-475.